

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**MENCARI MODEL KEPEMIMPINAN
PROFETIK TRANSFORMATIF:
MENUJU INDONESIA BERDAULAT**

Diselenggarakan Dalam Rangka memperingati Dies UNY ke 49
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
13 April 2013



akalah pendamping dalam Universitas Negeri Yogyakarta Ilmu Sosial. Semoga melahirkan kepemimpinan yang berdaulat.

karta, 13 April 2013

Dewi, M.PP.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA FISTRANS	iii
SAMBUTAN DEKAN	v
PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
I. Kontribusi Parpol dalam Mengembangkan Kepemimpinan	
Model Kepemimpinan Profetik Transformatif : Upaya Mencari Model Kepemimpinan yang Ideal dalam Menata Indonesia (Yanuardi)	3
Kontribusi Partai Keadilan Sejahtera dalam Mengembangkan Kepemimpinan Profetik Transformatif di Indonesia (Hardiyansyah)	8
Muslim Negarawan: Sebuah Refleksi Pemikiran Profetik (Nasiwan)	17
Karakteristik Kepemimpinan Politik Indonesia: Transaksional atau Transformatif? (Utami Dewi)	27
Peran Partai Politik dalam Mengembangkan Kepemimpinan Transformatif (Marita Ahdiyana)	37
<i>Entrepreneurial Leadership</i> : Menuju Transformasi Birokrasi dalam Pemberantasan Korupsi (Kurnia Nur Fitriana)	51
II. Kepemimpinan dalam Perspektif Historis di Indonesia	
Nasionalisme dalam Konsep Kepemimpinan Profetik Transformatif (Kajian Sejarah) (Zulkarnain)	65

Meraih Berkah Bukan Rupiah (Kepemimpinan Profetik Transformatif Pondok) (H. Haikal)	80
Figur Pemimpin Teladan (Syakdiah)	91
Pemimpin Generik Organik di Era Mabuk Demokrasi (Panji Hidayat)	99
Pemimpin Bervisi Spasial untuk Membangun (Kembali) Kejayaan Indonesia (Bambang Syaeful Hadi)	106
III. Peran Pendidikan dalam Mewujudkan Kepemimpinan Nasional Profetik Transformatif	
Strategi Mewujudkan Kepemimpinan Profetik Transformatif Melalui Pendidikan Demokrasi Menuju <i>Civil Society</i> (Ali Imron)	117
Integrasi Nilai Profetik dalam Pendidikan Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Pemimpin Profetik Transformatif (Laila Fatmawati)	123
Penanaman Nilai-nilai Kepemimpinan Profetik Pendidik Melalui Mata Kuliah Manajemen Pendidikan (Priadi Surya)	132
Implementasi Sikap Tanggung Jawab Sebagai Wujud Nilai-nilai Profetik dalam Evaluasi Perkuliahan di Jurusan Pendidikan Geografi (Muhammad Nursa'ban)	138
Membangun Keluarga Sebagai Madrasah untuk Penggemblengan Calon Pemimpin Berkarakter Profetik (Mu'awanah Zulaichah)	148
Menanamkan Jiwa Kepemimpinan dalam Pembelajaran Ekonomi (Enung Hasanah)	156
Pendidikan Kepemimpinan dalam Pembelajaran IPS (Supardi)	163
Bermula pada Guru: Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual, dan Kecerdasan Humanis (Rias Antho Rahmi Suharjo)	172
Multilingualisme dan Pemimpin Profetik Transformatif (Margana)	178

Tantangan. Yogyakarta:

3/02/17/300-kepala-
april 2013, pukul 12.30.

SUBTEMA:
KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF
HISTORIS DI INDONESIA

NASIONALISME DALAM KONSEP KEPEMIMPINAN PROFETIK TRANSFORMATIF (Kajian Sejarah)

Zulkarnain

Jurusan Pendidikan Sejarah, FIS, UNY

Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang konsep kepemimpinan profetik transformatif dari sudut pandang nasionalisme. Bila dikaji dari dimensi historisitas dan normativitas, nasionalisme dalam konsep kepemimpinan profetik transformatif merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini, tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Meskipun sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif. Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling tidak ada delapan fase pertumbuhan nasionalisme bila dikaitkan dengan kepemimpinan profetik transformatif di Indonesia yakni, nasionalisme akan teritori, kebangkitan nasionalisme yang ditandai dengan gerakan Budi Utomo, kepemimpinan profetik transformatif ditandai dengan kebangkitan nasionalisme tahun 1928, gerakan revolusi fisik kemerdekaan, perkembangan nasionalisme tahun 1966, kebangkitan angkatan tahun 1970-an, kebangkitan angkatan 1980-an, angkatan 1990-an. Selain kebangkitan nasionalisme, tulisan ini juga akan menyoroti gejala-gejala disintegrasi bangsa yang mengarah pada perpecahan dan mengancam nilai nilai nasionalisme oleh karenanya diperlukan kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Kata Kunci: *Nasionalisme, kepemimpinan Profetik Transformatif*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini kita sering disuguhkan informasi menarik oleh media masa baik itu media cetak maupun elektronik tentang ketidakmandirian bangsa kita sebagai negara berdaulat dalam mengatur tata kelola pemerintahan, pengaturan dan penguasaan sumber daya alam, serta aset-aset strategis lainnya. Ketidakmandirian pemimpin bangsa mendapat sorotan dari berbagai kalangan baik itu pengamat, pemuda, tokoh masyarakat dan dari tokoh lintas agama. Mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia sudah mendekati negara gagal, akibat pemimpin negara yang tidak mandiri, lemah, tidak berdaya dalam menghadapi intervensi asing.

Kondisi ini diperparah dengan perlakuan diskriminatif pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Gerakan-gerakan separatis seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Selatan), NII (Negara Islam Indonesia), aksi terorisme, secara terang-terangan melakukan perlawanan terhadap negara, dan yang lebih meyakinkan, negara-negara tetangga seperti Malaysia dengan entengnya mengklaim wilayah NKRI sebagai bagian wilayah negaranya. Para pahlawan devisa yang seharusnya diberikan pengayoman dan perlindungan oleh negara ternyata dengan sangat gampang dan tanpa pembelaan menerima hukuman mati dan hukuman pancung baik di negeri Jiran maupun di Timur Tengah. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan dan perlu perhatian dan tindakan serius dari berbagai elemen bangsa.

Sudah saatnya kita termasuk pemerintah mulai sadar dan mawas diri sekaligus bertanya, apakah mungkin seluruh persoalan kebangsaan dan nasionalisme dari perkumpulan etnik-etnik yang berbeda-beda *world-view*, karakter, budaya, agama, setelah mereka bersedia dan rela bergabung dalam sebuah negara Indonesia, lantas segala persoalan bisa dianggap selesai begitu saja....? Bukankah kita seharusnya juga menyadari, bahwa persatuan etnis dan teritorial yang telah berhasil dibangun di awal kemerdekaan hingga saat ini, baru hanya sebatas persatuan awal yang masih sangat simbolis sifat dan tingkat kesadaran nasionalismenya, yang tentu saja masih sangat rentan terhadap perpecahan. Oleh karena kalau saudara-saudara di forum seminar ini tidak mau dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki rasa nasionalisme mari simak dan dengarkan secara serius konsep nasionalisme dalam kaitannya dengan kepemimpinan profetik transformatif.

Nasionalisme dalam Kepemimpinan Profetik Transformatif

Cita-cita akan lahirnya pemimpin profetik transformatif di negeri tercinta ini sepertinya masih jauh dari harapan, pemimpin di negeri ini lebih sibuk mengurus partai politik dan melakukan politik pecitraan terhadap diri, keluarga, dan kelompoknya. Wakil wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen sebagai tumpuan harapan guna menyalurkan aspirasi dan menyuarakan kepentingan rak-

umat yang diwakilinya juga sangat mengecewakan. Mereka baru bersuara lantang ketika kepentingan diri dan partainya terganggu oleh penguasa, namun demikian kita tidak boleh berhenti untuk bermimpi. Melalui seminar dan diskusi pada sesi paralel ini diharapkan akan lahir ide, gagasan-gagasan guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Selaku dosen di Pendidikan Sejarah, saya akan membahas Konsep Kepemimpinan Profetik Transformatif dari sudut pandang nasionalisme.

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakutkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini, tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Meskipun sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif.

Nasionalisme sebagai gejala historis memiliki peranan *urgent* pada abad XX dalam proses nation formation negara-negara nasional modern di Asia dan Afrika. Ideologi kolektif nasionalisme tersebut memiliki fungsi teleologis serta memberi orientasi bagi suatu masyarakat sehingga terbentuk solidaritas yang menjadi landasan bagi proses pengintegrasian sebagai nation atau komunitas politik. Sebagai ideologi kebangsaan, nasionalisme terbentuk *counter-ideology* terhadap kolonialisme dan imperialisme yang sanggup menawarkan realitas tandingan serta menyajikan orientasi tujuan bagi gerakan politik yang berjuang untuk mewujudkan realitas substantive tersebut. Dalam konsepsi ini, pengalaman kolektif yang serba destruktif masa penjajahan menawarkan fungsi sejati nasionalisme sebagai penyatu solidaritas baru, yang jauh melampaui fungsi ikatan primordialnya. Nasionalisme adalah tawaran, sekaligus harapan bagi bangsa yang menghendaki kokohnya bangunan integrasi dan kedaulatan di atas fondasi moral humanistik.

Namun demikian, dalam perjalanan sejarah panjang bangsa teridentifikasi bahwa cita-cita kolektif kebangsaan tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan. Sebenarnya kesadaran kolektif nasionalisme tersebut merupakan perwujudan bangunan konsep persatuan Indonesia, sebagaimana amanat sila ketiga Pancasila, tempat kebersamaan segenap bangsa Indonesia dengan asal-usul bangsa atau ras, agama, etnik, adat-istiadat, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan ideologi politiknya yang pluralistik. Asas pluralisme yang dahulu menjadi sumber kekuatan hebat masa kolonialisme dan imperialisme, ruhnya perjuangan

Transformatif

Transformatif di negeri tercinta negeri ini lebih sibuk menggerakkan terhadap diri, keluarga, dan di kursi parlemen sebagai menyuarakan kepentingan rak-

merebut kemerdekaan, ternyata pada saat bangsa ini dihadapkan pada degradasi kebangsaan, tak urung asas pluralisme tersebut menjadi medan ekspresi kekecewaan dan sumber kerawanan konflik.

Konsep nation mendapat makna baru yang lebih positif dan menjadi umum dipakai setelah abad ke-18 di Prancis. Ketika itu Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka sebagai *assemblée nationale* yang menandai transformasi institusi politik tersebut, dari sifat eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak yang sama dengan kaum kelas elite dalam berpolitik. Jika pada masa Abad Pertengahan (abad ke-5-15), kebebasan individu dan kebebasan berpikir banyak didominasi oleh kekuasaan dan otoritas agama (gereja), maka sesudah renaissance, timbullah cita-cita kemerdekaan, lepas dari segala bentuk dominasi, dan pula dari dominasi dogma agama (A. Daliman, 2006: 57). Dari sinilah makna kata nation menjadi seperti sekarang yang merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara.

Dinamika nasionalisme sebagai sebuah konsep yang merepresentasikan sebuah politik, bagaimanapun jauh lebih kompleks dari transformasi semantik yang mewakilinya. Begitu rumitnya pemahaman tentang nasionalisme membuat ilmuwan sekaliber Max Weber pun nyaris frustrasi manakala harus memberikan terminologi sosiologis tentang makna nasionalisme. Bagaimanapun bentuk penjelasan tentang nasionalisme, baik itu dari dimensi kekerabatan biologis, etnisitas, bahasa, maupun nilai-nilai kultur, menurut Weber, hanya akan berujung pada pemahaman yang tidak komprehensif. Kekhawatiran Weber ini wajar mengingat komitmennya terhadap epistemologi modernisme yang mencari pengetahuan universal. Termasuk dua bapak ilmu sosial Karl Marx dan Emile Durkheim pun tidak menaruh perhatian serius pada isu nasionalisme walau tentu saja pemikiran mereka banyak mengilhami penjelasan tentang fenomena nasionalisme (Sulfikar Amir, 2007). Tetapi, itu tak berarti nasionalisme harus disikapi secara *taken for granted* dan diletakkan jauh-jauh dari telaah teoritis.

Besarnya implikasi nasionalisme dalam berbagai dimensi sosial mengundang para sarjana berusaha memahami sekaligus mencermati secara kritis konsep bangsa dan kebangsaan (nasionalisme), seberapa pun besarnya paradoks dan ambivalensi yang dikandungnya. Tentu saja upaya memecahkan teka-teki nasionalisme tidaklah mudah mengingat, begitu beragam faktor yang membentuk bangunan nasionalisme, sehingga indikatornya tidak dapat diidentifikasi secara pasti.

Hans Kohn, sejarawan yang cukup terkenal dan paling banyak karya tulisnya mengenai nasionalisme, memberikan terminologi yang sampai saat ini masih tetap digunakan secara relevan dalam pembelajaran di sekolah, yakni: "*nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*". Nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan

(Hans Kohn, 1965: 9). Konsep nasionalisme tersebut menunjukkan bahwa selama berabad-abad silam kesetiaan orang tidak ditujukan kepada *nation state* atau negara kebangsaan, melainkan kepada berbagai bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik, raja feodal, suku, negara kota, kerajaan dinasti, golongan keagamaan atau gereja.

Menurut Muhammad Imarah (1998: 281), cinta tanah air atau nasionalisme adalah fitrah asli manusia dan sama dengan kehidupan, sedangkan kehilangan rasa cinta tanah air sama dengan kematian. Hasan al-Banna (1906-1949) dalam Imarah (1998: 282-283), berbicara tentang nasionalisme serta kedudukannya pada kebangkitan Islam modern mengemukakan, "...sesungguhnya Ikhwanul Muslimin mencintai negeri mereka; menginginkan persatuan dan kesatuan; tidak menghalangi siapapun untuk loyal kepada negerinya, lebur dalam cita-cita bangsanya, dan mengharapkan kemakmuran dan kejayaan negerinya. Kita bersama para pendukung nasionalisme, bahkan juga bersama mereka yang berhaluan nasionalis ekstrim sejauh menyangkut kemaslahatan bagi negeri ini dan rakyatnya..."

Dalam konsepsi politik, terminologi nasionalisme sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik yakni pembentukan dan pelestarian negara nasional. Dengan demikian pembahasan masalah nasionalisme pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi (Sartono Kartodirdjo, 1994: 4).

Nasionalisme sebagai sebuah produk modernitas, perkembangannya berada di titik persinggungan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Tetapi nasionalisme tidak sekedar dilihat sebagai sebuah proses dari atas ke bawah di mana kelas dominan memiliki peranan lebih penting dalam pembentukan nasionalisme daripada kelas yang terdominasi. Ini berarti bahwa pemahaman komprehensif tentang nasionalisme sebagai produk modernitas hanya dapat dilakukan tentunya juga dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat di lapisan paling bawah ketika asumsi, harapan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat pada umumnya terhadap ideologi nasionalisme memungkinkan ideologi tersebut meresap dan berakar secara kuat. Pada tingkat inilah elemen-elemen sosial seperti bahasa, kesamaan sejarah, identitas masa lalu, dan solidaritas sosial menjadi pengikat erat kekuatan nasionalisme.

Benedict Anderson (1991) memandang nasionalisme sebagai sebuah ide atas komunitas yang dibayangkan, *imagined communities*. Dibayangkan karena setiap anggota dari suatu bangsa, bahkan bangsa yang terkecil sekalipun, tidak mengenal seluruh anggota dari bangsa tersebut. Nasionalisme hidup dari bayangan tentang komunitas yang senantiasa hadir di pikiran setiap anggota bangsa yang menjadi referensi identitas sosial. Pandangan konstruktivis yang

ini dihadapkan pada degra-
ut menjadi medan ekspresi

h positif dan menjadi umum
Parlemen Revolusi Prancis
ang menandai transformasi
hanya diperuntukkan bagi
kelas meraih hak yang sama
la masa Abad Pertengahan
berpikir banyak didominasi
esudah renaissance, timbullah
nominasi, dan pula dari domi-
makna kata nation menjadi
ompok manusia yang menja-

ep yang merepresentasikan
dari transformasi semantik
tang nasionalisme membuat
anakala harus memberikan
Bagaimanapun bentuk pen-
kerabatan biologis, etnisitas,
hanya akan berujung pada
Weber ini wajar mengingat
yang mencari pengetahuan
x dan Emile Durkheim pun
e walau tentu saja pemikiran
nena nasionalisme (Sulfikar
us disikapi secara *taken for*

gai dimensi sosial mengun-
cermati secara kritis konsep
un besarnya paradoks dan
memecahkan teka-teki nasio-
n faktor yang membentuk
dapat diidentifikasi secara

dan paling banyak karya
nologi yang sampai saat ini
elajaran di sekolah, yakni:
alty of individual is felt to be
faham yang memandang
kepada negara kebangsaan

dianut Anderson menarik karena meletakkan nasionalisme sebagai sebuah hasil imajinasi kolektif dalam membangun batas antara kita dan mereka, sebuah batas yang dikonstruksi secara budaya melalui kapitalisme percetakan, bukan semata-mata fabrikasi ideologis dari kelompok dominan (Sulfikar Amir, 2007).

Konsep Anderson sangat unik dan selanjutnya dapat ditarik lebih jauh untuk menjelaskan kemunculan nasionalisme di negara-negara pascakolonial. Tidaklah suatu hal yang kebetulan apabila konsep Anderson sebagian besar didasarkan atas pengamatan terhadap dinamika sejarah pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Namun demikian, karya Anderson yang dapat menjadi sumber kritik orientalisme seperti yang ditengarai oleh Edward Said terhadap cara pandang ilmuwan Barat dalam merepresentasikan masyarakat non-Barat (Anderson dalam Sulfikar Amir, 2007).

Dalam bukunya, *Imagined Communities*, Anderson berpendapat bahwa nasionalisme masyarakat pascakolonial di Asia dan Afrika merupakan hasil emulasi dari apa yang telah disediakan oleh sejarah nasionalisme di Eropa. Para elite nasionalis di masyarakat pascakolonial hanya mengimpor bentuk modular nasionalisme bangsa Eropa. Di sini letak problematika dari pandangan Anderson karena menafikan proses-proses apropriasi dan imajinasi itu sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pascakolonial dalam menciptakan bangunan nasionalisme yang berbeda dengan Eropa.

Anderson juga mengikuti perkembangan nasionalisme pasca Perang Dunia II yang melanda negara-negara jajahan di Asia dan Afrika, yang karakternya ditandai oleh penyebaran nasionalisme melalui bahasa penjajah baik di sekolah-sekolah, media massa, maupun birokrasi yang menghasilkan golongan terpelajar putera, kesatuan administrasi pemerintahan; dan karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi membentuk kecenderungan sentralisasi pada pemerintahan pusat di ibukota, yang sedang berkembang menjadi metropolitan (Benedict Anderson, 1983: 49).

Berdasarkan hal itu dapat ditesiskan bahwa nasionalisme merupakan penemuan bangsa Eropa yang diciptakan untuk mengantisipasi keterasingan yang merajalela dalam masyarakat modern. Sebagai sebuah ideologi, nasionalisme memiliki kapasitas memobilisasi massa melalui janji-janji kemajuan yang merupakan teleologi modernitas. Kondisi-kondisi yang terbentuk ini tak lepas dari Revolusi Industri ketika urbanisasi dalam skala besar memaksa masyarakat pada saat itu untuk membentuk sebuah identitas bersama. Dengan kata lain, nasionalisme dibentuk oleh kematerian industrialisme yang membawa perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Meskipun demikian, harus diingat bahwa nasionalisme tidak harus terbatas pada nasionalisme politik. Bahkan dalam sebuah negara bangsa pun masih ada kesadaran akan nasionalisme berdasarkan kesamaan suku, etnis, agama, atau pulau tertentu. Ini adalah bagian dari nasionalisme kultural yang tidak perlu ditakuti. Di Indonesia pun hal semacam ini dapat terjadi. Kesadaran kebangsaan orang Aceh, orang Makassar,

alisme sebagai sebuah hasil ta dan mereka, sebuah batas e percetakan, bukan semata- bulfikar Amir, 2007).

ya dapat ditarik lebih jauh gara-negara pascakolonial. Anderson sebagian besar arah pertumbuhan dan per- ikian, karya Anderson yang ng ditengarai oleh Edward merepresentasikan masya- 2007).

Anderson berpendapat bahwa n Afrika merupakan hasil ah nasionalisme di Eropa. nya mengimpor bentuk mo- blematika dari pandangan si dan imajinasi itu sendiri um menciptakan bangunan

alisme pasca Perang Dunia i Afrika, yang karakternya sa penjajah baik di sekolah- uasilkan golongan terpelajar arena kemajuan di bidang ngan sentralisasi pada pe- ang menjadi metropolitan

sionalisme merupakan pe- ntisipasi keterasingan yang ah ideologi, nasionalisme janji kemajuan yang meru- erbentuk ini tak lepas dari esar memaksa masyarakat ersama Dengan kata lain, e yang membawa perubah- n demikian, harus diingat ionalisme politik. Bahkan nakan nasionalisme berda- ertentu. Ini adalah bagian i. Di Indonesia pun hal se- ng Aceh, orang Makassar,

Minahasa, Madura, Jawa, Papua, atau Sunda, dapat dipahami sebagai kesadaran nasionalisme kultural. Negara tidak perlu takut bahwa kesadaran semacam ini akan berkembang ke arah separatisme dan upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang penting negara sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan benar.

Jika kita simak beberapa pendapat tentang nasionalisme maka nasionalisme dalam konsep kehidupan bernegara dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni: (1) kesatuan (*unity*), dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan *policy* kebudayaan; (2) kebebasan (*liberty, freedom, independence*), dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; (3) kesamaan (*equality*), dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; (4) kepribadian (*personality*) dan identitas (*identity*), yaitu memiliki harga diri (*self esteem*), rasa bangga (*pride*) dan rasa sayang (*depotion*) terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; (5) prestasi (*achievement*), yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare*) serta kebesaran dan kemanusiaan (*the greatnees adn the glorification*) dari bangsanya (Sartono Kartodirdjo, 1999: 7-8).

Amerika Serikat merupakan negara kebangsaan modern (*the modern nation state*) pertama yang dibangun tidak berdasarkan keturunan dan persamaan agama, tidak pula didasarkan pada bahasa dan tradisi-tradisi kesustraan atau hukum yang sama dari suatu bangsa. Bangsa dan negara tersebut dilahirkan dari suatu usaha bersama, dalam suatu revolusi perjuangan untuk memperoleh hak-hak politik, kemerdekaan perseorangan dan toleransi mengenai asal-usul ras dalam suatu "melting-pot". Bangsa ini dipersatukan oleh cita-cita, cita-cita kemerdekaan di bawah undang-undang, seperti dinyatakan dalam konstitusi. Konstitusi Amerika mulai berlaku pada tahun 1789, tahun meletusnya revolusi Perancis. Konstitusi tersebut mampu mempertahankan diri dari berbagai ujian jaman melebihi konstitusi-konstitusi negara manapun di seluruh dunia (Hans Kohn, 1965: 26-27).

Demikian pula halnya dengan negara republik Indonesia yang didirikan bersama dalam bentuk bangunan negara kebangsaan menurut teori-teori dan prinsip-prinsip nasionalisme modern yang sangat mirip dengan yang dianut Amerika Serikat. Konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep bhinneka tunggal ika (pluralisme) menurut pola dan kriteria-kriterianya merupakan produk sejarah. Demikian pula untuk membangun tekad kesatuan (*unity*), bangsa kita memerlukan waktu lebih dari seperempat abad dengan dipancangkannya tiga tonggak sejarah, yakni kebangkitan bangsa dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908, dicanangkannya manifesto politik oleh Perhimpunan Indonesia (1925) dan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Baru kemudian pada 17 Agustus 1945 diikrarkanlah proklamasi kemerdekaan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah terlepas dari belenggu asing (A. Daliman, 2006: 62).

Pertumbuhan Nasionalisme dalam Kepemimpinan Profetik Transformatif

Dalam sejarah Indonesia dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme didaur ulang kembali oleh para generasi muda, karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme bangsanya. Dalam konsepsi ini, paling tidak ada delapan fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia yakni sebagai berikut :

Pertama; Nasionalisme akan teritori. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diduduki dan dieksploitasi Belanda untuk kepentingannya telah melahirkan kesadaran akan sebuah tanah air (teritori) yang harus dibebaskan supaya masyarakatnya bisa membangun kehidupan bersama yang adil, damai, dan sejahtera. Kesadaran akan teritori ini tidak bersifat regional atau lokal terbatas pada wilayah tertentu saja yang dihuni oleh kelompok suku atau etnis yang sama – tetapi kesadaran ke-Indonesia-an. Karena itu, arti “tanah airku” dalam nasionalisme Indonesia bukan terbatas tanah air (lokalitas) tempat seseorang dilahirkan – desa tertentu atau pulau tertentu – tetapi sebuah tanah air Indonesia. Akibatnya, masyarakat Indonesia yang mengidentifikasi diri sebagai berbangsa Indonesia sungguh menyadari diri sebagai beraneka ragam suku, agama, ras, bahkan wilayah (*territory*).

Kedua; Kebangkitan Budi Utomo. Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Republik Philipina (1898), yang dipelopori Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tunisia (1905), gerakan Sun Yat Sen dengan Republik Cina (1911). Partai Kongres di India dengan tokoh tilak dan Gandhi (Kaelan, 2002). Sedangkan di Indonesia gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priyayi Jawa, di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Kemudian pasca Perang Dunia I, filsafat nasionalisme abad pertengahan mulai merambat ke negara-negara jajahan melalui para mahasiswa negara jajahan yang belajar ke negara penjajah. Filsafat nasionalisme itu banyak memengaruhi kalangan terpelajar Indonesia, misalnya, Soepomo ketika merumuskan konsep negara integralistik banyak menyerap pikiran Hegel. Bahkan, Soepomo terang-terangan mengutip beberapa pemikiran Hegel tentang prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Begitu pula pada masa kini banyak diciptakan lagu-lagu kebangsaan yang sarat dengan muatan semangat nasionalisme seperti Indonesia Raya, Dari Sabang Sampai Merauke, Padamu Negeri, dan sebagainya (A. Fanar Syukri, dalam <http://ppi-jepang.org/article.php?id=1>, diakses tanggal 2 Agustus 2007).

Ketiga; Kebangkitan tahun 1928. Kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yakni 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, Jong

nan Profetik Transformatif

bangkitan rasa nasionalisme karena mereka merasa ada bangsanya. Dalam konsepsi nasionalisme di Indonesia yakni

Indonesia dari Sabang sampai untuk kepentingannya telah (ori) yang harus dibebaskan n bersama yang adil, damai, bersifat regional atau lokal h kelompok suku atau etnis rena itu, arti "tanah airku" ah air (lokalitas) tempat tertentu – tetapi sebuah tanah ng mengidentifikasi diri se-iri sebagai beraneka ragam

di panggung politik interna-tu kesadaran akan kekuatan Jose Rizal, kemenangan Je-Sen dengan Republik Cina dan Gandhi (Kaelan, 2002). nasionalisme Indonesia dimotori anak para priyayi Jawa, di dian pasca Perang Dunia I, bat ke negara-negara jajahan ke negara penjajah. Filsafat pelajar Indonesia, misalnya, gsalistik banyak menyerap ngutip beberapa pemikiran dan rakyat dan persatuan ni banyak diciptakan lagu-t nasionalisme seperti Indo-Negeri, dan sebagainya (A. hp.id=1, diakses tanggal 2

nasionalisme tahun 1928, kesadaran untuk menyatu-t, bangsa dan bahasa Indo-ulai terkotak-kotak dengan bes, Jong Sumatera, Jong

Ambon, dan lain sebagainya, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemoeda di tahun 1928. Dasar inilah yang selanjutnya dijadikan pijakan dan filosofi perjuangan menuju kemerdekaan.

Keempat; Revolusi Fisik Kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan, nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas-Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan *nation state* yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Hasrat dan cita-cita mengisi kemerdekaan yang sudah banyak didiskusikan oleh Soekarno, Hatta, Soepomo, Syahrir, dan lain sebagainya sejak mereka masih berstatus mahasiswa, harus mengalami pemblokiran implementasi di lapangan, karena Soekarno yang semakin otoriter dan keras kepala dengan cita-cita dan cara yang diyakininya. Akhirnya Soekarno banyak ditinggalkan teman-teman seperjuangan yang masih memegang idealismenya, dan mencapai puncaknya ketika Hatta, sebagai salah seorang proklamator, harus mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, karena tidak kuat menahan diri untuk terus menyetujui sikap dan kebijakan Presiden Soekarno yang semakin otoriter.

Kelima; Kebangkitan tahun 1966. Perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapu dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara terasa sulit memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Angkatan '66 yang dipelopori kaum muda mampu merobohkan demokrasi terpimpin ala Soekarno dan politik kekuasaan yang condong pada sosialis. Angkatan muda dengan sokongan militer melahirkan rezim orde baru. Tetapi sayang beribu sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKR maupun pemuda dalam menumbang penguasa orde lama.

Keenam; Kebangkitan angkatan tahun 1970-an. Gerakan atau kebangkitan nasionalisme pada tahun 1974 dikenal dengan peristiwa Malari (Malapateka Lima Belas Januari). Gerakan ini merupakan klimaks kekesalan para tokoh dan gerakan muda atas kebijakan negara di bawah komando Pemerintahan Orde Baru yang sangat pro atau sudah dikuasai oleh pemodal asing, mereka menganggap negara tidak lagi mempunyai kemandirian di bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan keamanan. Gerakan ini sekaligus mengirim pesan pada penguasa orde baru agar tidak lupa pada cita-cita awal kelahiran orde baru, yakni mewujudkan kemandirian sebagai Negara bedaulat menuju kesejahteraan rakyat. Bila pemeritah yang telah diberi mandat oleh rakyat sudah melakukan tindakan di luar rel maka bersiap-siaplah berhadapan dengan kekuatan rakyat. Tahun 1970-an mahasiswa juga dihadapkan pada kekuatan yang membelenggu kebebasan akademis di kalangan kampus. Mereka memperjuangkan kebebasan

akademik dan membebaskan kampus dari kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Mahasiswa menolak keras pembatasan gerakannya dalam berpolitik, dimana mahasiswa dikungkung hanya dalam ruang kuliah di lingkungan kampus. Sementara di sisi lain para tentara semakin menggurita ke dalam tatatan masyarakat sipil lewat dwifungsi ABRI (Indra dalam *Kompas*, 31 Oktober 2011).

Ketujuh; Kebangkitan angkatan 1980-an. Setelah gerakan pemuda sempat mengalami kefakuman akibat tindakan pemerintah yang represif, mengancam keselamatan jiwa kalangan pergerakan dari kaum pemuda dan mahasiswa, maka mulai tahun 1980 sampai awal tahun 1990 pemuda dan mahasiswa kembali bangkit dengan cara melakukan gerakan-gerakan perubahan menuju kebebasan berfikir, demokratisasi dan perjuangan Hak Azasi Manusia. Gerakan-gerakan kelompok ini ditandai dengan munculnya kelomok studi di kampus maupun di luar kampus, lembaga pers alternatif, forum komunikasi atau komite rakyat bersamaan dengan munculnya LSM. Berbeda dengan gerakan sebelumnya, inti kekuatan gerakan ini bukan hanya di kampus, namun di tempat-tempat yang sederhana seperti di sekretariat organisasi kepemudaan dan mahasiswa, rumah kos, gubuk petani korban penggusuran, dan di barak-barak buruh pabrik. Pendewasaan intelektual generasi ini bersifat "organik" dan jauh lebih matang karena mempunyai sarana pers. Mahasiswa, kelompok diskusi, dan aksi solidaritas terhadap warga masyarakat yang paling tidak diuntungkan oleh kebijakan penguasa Orde Baru.

Kedelapan; Angkatan 1990-an. Pada dekade tahun 1990-an mahasiswa ditekan dan yang berdemo akan ditahan. Pada masa itu, gerakan mahasiswa lebih bersifat politis dan fisik. Pembentukan opini atau pembangunan wacana tidak diperlukan lagi, karena pada saat itu hanya ada dua pertarungan yakni pertarungan antara rezim penguasa dengan mahasiswa. Angkatan ini hadir sebagai aktor perubahan yang menumbangkan rezim otoriter di bawah penguasa Orde Baru. Gerakan mahasiswa tahun sembilan puluhan mencapai klimaksnya pada tahun 1998, diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Mahasiswa pun mulai gerah dengan penguasa Orba, tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa.

Ibarat gayung bersambut, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasinya mendapat simpati dan dukungan yang luar biasa dari rakyat. Mahasiswa menjadi tumpuan rakyat dalam mengubah kondisi yang ada, yakni kondisi rakyat yang sudah bosan dengan pemerintahan yang terlalu lama, 32 tahun. Politisi di luar kekuasaan pun menjadi tumpul karena terlalu kuatnya lingkaran kekuasaan, dan dikenal dengan sebutan jalur ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar). Walaupun kalangan muda di bawah komando mahasiswa berbeda warna, berbeda almamater, berbeda ideologi, keyakinan, tetapi mereka punya kesamaan yang disatukan oleh rasa nasionalisme dan semangat membara untuk membebaskan diri dari kekuasaan yang otoriter.

akan Normalisasi Kehidupan
batasan gerakannya dalam ber-
am ruang kuliah di lingkungan
n menggurita ke dalam tatatan
lam *Kompas*, 31 Oktober 2011).
elah gerakan pemuda sempat
tah yang represif, mengancam
pemuda dan mahasiswa, maka
dan mahasiswa kembali bang-
arahan menuju kebebasan berfi-
lanusia. Gerakan-gerakan ke-
: studi di kampus maupun di
munikasi atau komite rakyat
gan gerakan sebelumnya, inti
amun di tempat-tempat yang
idaan dan mahasiswa, rumah
rak-barak buruh pabrik. Pen-
nik" dan jauh lebih matang
mpok diskusi, dan aksi soli-
idak diuntungkan oleh kebi-

ahun 1990-an mahasiswa dite-
tu, gerakan mahasiswa lebih
pembangunan wacana tidak
ua pertarungan yakni perta-
t. Angkatan ini hadir sebagai
iter di bawah penguasa Orde
n mencapai klimaksnya pada
neter di pertengahan tahun
, daya beli masyarakat pun
nguasai Orba, tuntutan mun-
n mahasiswa.

dengan agenda reformasinya
ri rakyat. Mahasiswa menjadi
a, yakni kondisi rakyat yang
ma, 32 tahun. Politisi di luar
nya lingkaran kekuasaan, dan
at, dan Golkar). Walaupun
beda warna, berbeda alma-
unya kesamaan yang disatu-
ra untuk membebaskan diri

Gugatan Kritis terhadap Nasionalisme

Kalau pada subpokok bahasan sebelumnya kita telah membahas semangat nasionalisme kaum muda dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dalam membebaskan negara dari kekuasaan yang otoriterian menuju negara demokrasi, kini kaum muda kembali mendapat sorotan, kaum muda dianggap telah terjerembab pada penguatan kultur radikalisme pasar bebas yang dipandu logika kapitalisme, terkontaminasi kultur atau kebudayaan barat yang acuh tak acuh, kurang peduli terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sedangkan kaum muda yang masuk ke ranah politik dan menjadi pengendali kekuasaan di jajaran elite pemeritahan ternyata larut dalam kenikmatan kekuasaan politik transaksional yang dipandu oleh juragan pemilik modal, pembelaan terhadap rakyat kecil yang selama ini nyaring disuarakan, lambat laun sudah mulai redup, diibaratkan ular piton yang kekenyangan sehabis menelan mangsaya.

Selain sorotan terhadap kaum muda, pemimpin negara juga tidak lepas dari kritikan pedas baik dari kelompok muda yang masih mempuyai idealisme maupun dari tokoh masyarakat dan dari tokoh lintas agama. Mereka menganggap bahwa bangsa Indonesia sudah mendekati negara gagal, akibat pemimpin negara yang tidak mandiri, lemah, tidak berdaya dalam menghadapi intervensi asing. Kondisi ini diperparah dengan perlakuan diskriminatif dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Gugatan kritis ini hendaknya membuat kita merenung ulang dan belajar dari perjalanan sejarah masa lalu. Pemerintah tidak boleh skeptis, alergi terhadap kritikan dan gugatan yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menyikapi masalah-masalah kebangsaan. Pemerintah hendaknya bersikap arif menghindari tindakan-tindakan rekatif seperti menyerang balik tokoh lintas agama dengan tuduhan, "Tokoh agama yang bersuara lantang diidentikkan dengan burung gagak pemakan bangkai yang berbulu putih". Istilah seperti ini tentu menyakitkan dan akan memancing reaksi dari jutaan rakyat yang merasa pemimpinnya dilecehkan, yang ujung-ujungnya menimbulkan perpecahan dan kebencian terhadap pejabat pemerintah.

Sudah saatnya kita, termasuk pemerintah, mulai sadar dan mawas diri sekaligus bertanya, apakah mungkin seluruh persoalan kebangsaan dan nasionalisme dari perkumpulan etnik yang berbeda-beda *world-view*, karakter, budaya, agama, setelah mereka bersedia dan rela bergabung dalam sebuah negara Indonesia, lantas segala persoalan bisa dianggap selesai begitu saja....? Bukankah kita seharusnya juga menyadari bahwa persatuan etnis dan teritorial yang telah berhasil dibangun di awal kemerdekaan hingga saat ini, baru hanya sebatas persatuan awal yang masih sangat simbolis sifat dan tingkat kesadaran nasionalismenya, yang tentu saja masih sangat rentan terhadap perpecahan (*fragile*).

Berdasarkan pengamatan dan analisa penulis, saat ini ada beberapa gejala-gejala yang menjurus ke arah disintegrasi yang mengancam nasionalisme kebangsaan kita, di antaranya sebagai berikut :

1. Sifat kedaerahan yang berlebihan atau Primordialisme
Primordialisme adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan golongan berdasarkan identitas daerah, agama, ras, suku, atau golongannya. Secara etimologi, primordialisme berasal dari kata Latin prima atau primus yang artinya "yang utama." Primordialisme merupakan sikap atau pandangan yang sempit karena lebih mengutamakan identitas atau kepentingan daerah, suku, atau budaya lokalnya dibandingkan dengan kepentingan umum atau bangsa. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah akibat otonomi daerah muncul raja raja kecil, dimana yang memegang posisi strategis di jajaran birokrasi adalah kelompok yang dekat dengan penguasa daerah, dan isu putrah daerah non putra daerah terus menggelinding dan kadang-kadang menjadi pertimbangan pertama dalam penempatan seseorang dalam jajaran birokrasi. Kondisi ini bila tidak disikapi secara serius tentu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kebodohan dan Isolasi
Kebodohan dan isolasi atau ketertutupan adalah juga faktor-faktor yang menghambat integrasi. Masyarakat yang bodoh biasanya memiliki pandangan yang sempit. Mereka mengisolasi diri dalam lingkungan tempat tinggalnya. Mereka memandang dunia ini hanya terbatas pada lingkungan sosialnya. Di luar lingkungan sosial mereka adalah orang lain atau orang asing yang dipandang berbeda dengan mereka. Kondisi masyarakat seperti ini merupakan faktor penghambat integrasi karena akan sangat mudah dipecah-pecah oleh golongan yang berniat untuk mengadakan perpecahan atau disintegrasi. Contohnya aliran-aliran yang mengkafirkan kelompok lain dan menganggap kelompok mereka yang paling suci dan bersih.
3. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial Ekonomi
Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi adalah faktor yang menghambat integrasi. Kesenjangan sosial ekonomi, baik kesenjangan antar golongan masyarakat ataupun kesenjangan antar daerah, adalah faktor yang memperlemah integrasi. Apabila kemiskinan dan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin ini terjadi, yang muncul adalah sikap prasangka dan kecemburuan dari golongan yang miskin terhadap yang kaya. Apabila kebetulan yang miskin dan yang kaya tersebut berasal dari etnis atau suku yang berbeda, isu yang muncul dimunculkan ke permukaan bukanlah masalah kesenjangan sosial-ekonominya melainkan soal etnis atau suku bangsa.
4. Perlakuan negara yang diskriminatif terhadap rakyat.
Kebijakan Negara terhadap daerah sering di luar batas kepatutan, daerah yang sumber daya alamnya melimpah dan sebagai penopang APBN tertinggi bagi Negara Republik Indonesia, justru kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan. Contoh kongkritnya adalah Kabupaten

mordialisme

memertikan kepentingan golongan, ras, suku, atau golongannya. Dari kata Latin prima atau primus, merupakan sikap atau pandangan identitas atau kepentingan dibandingkan dengan kepentingan paling sederhana adalah akibatnya yang memegang posisi strategis yang dekat dengan penguasa daerah terus menggeling dan sama dalam penempatan sesuatu tidak disikapi secara serius dan kehidupan berbangsa dan

adalah juga faktor-faktor yang sudah biasanya memiliki panji dalam lingkungan tempatnya terbatas pada lingkungan adalah orang lain atau orang tua. Kondisi masyarakat seperti ini karena akan sangat mudah untuk mengadakan perpecahan yang mengkafirkan kelompok yang paling suci dan bersih.

ini adalah faktor yang menghambat kesenjangan antar golongan, adalah faktor yang memperjelas kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Apabila keberuntungan berasal dari etnis atau suku, di permukaan bukanlah masalah, tetapi soal etnis atau suku bangsa akan sangat berpengaruh terhadap rakyat.

di luar batas kepatutan, daerah ini sebagai penopang APBN dan kondisi sosial ekonominya yang kritisnya adalah Kabupaten

Sumbawa Barat. Negara setiap tahunnya menerima royalti dari PT Neymon Nusa Tenggara (perusahaan pengelola tambang emas terbesar di Indonesia) sebesar Rp5,89 triliun. Dari jumlah itu, pemda Propinsi Nusa Tenggara Barat hanya menerima 4,57% atau sekitar Rp260 miliar. Dana 260 miliar ini didistribusikan kembali ke 10 kabupaten kota yang ada di propinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga praktis kabupaten Sumbawa Barat selaku kabupaten penghasil hanya memperoleh dana bagi hasil sekitar 65 miliar.

Yang lebih menyakitkan lagi ketika pembahasan Dana Alokasi Umum di Departemen Keuangan RI, Kabupaten Sumbawa Barat justru mendapat alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) terkecil jika dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, termasuk daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam. Alasan yang diberikan pemerintah pusat sangat-sangat tidak logis dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Sumbawa Barat, ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Pemerintah beranggapan bahwa dana alokasi umum yang diberikan memang relatif kecil karena dana yang diberikan dikurangi besaran dana royalti yang diberikan oleh negara kepada daerah penghasil. Kondisi ini juga terjadi di Kalimantan, Papua, Riau, dan beberapa daerah penghasil sumber daya alam lainnya di Indonesia.

5. Kebijakan ekonomi negara neoliberalisme.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemimpin negara dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis terutama di bidang ekonomi tidak pernah lepas dari intervensi asing terutama regulasi pemerintah di bidang perdagangan dan pertambangan. Sering dengan semakin cerdasnya masyarakat, suara-suara kritis sudah mulai muncul ke permukaan.

Contoh yang paling sederhana adalah masyarakat dan pemerintah Kab. Sumbawa Barat. Mereka sudah mulai bersuara lantang mempertanyakan manfaat perusahaan tambang emas-tembaga yang mengeksploitasi alamnya melalui konsersium PT Neymon Nusa Tenggara, yang sebagian besar sahamnya dimiliki asing. Keberadaan perusahaan raksasa ini ternyata tidak membawa efek buat masyarakat, baik di sekitar tambang maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Masyarakat hanya dijadikan tumbal sekaligus menjadi penonton ketika alamnya dieksploitasi. Masyarakat sekitar tambang kondisinya tetap miskin, sementara para bule berambut pirang berpesta pora menghambur-hamburkan dolar, pejabat-pejabat pusat yang kecipratan hidup bermewah-mewah.

Pemerintah pusat dibuat tidak berdaya dan takluk di dalam kungkungan asing. Masyarakat yang mulai gerah dengan tindakan kaum imperialisme ini, ternyata dibenturkan dengan preman-preman berambut cepak yang seharusnya melindungi rakyat. Bila hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil masyarakat Sumbawa Barat mengikuti jejak saudara-saudaranya yang ada di Papua, Aceh, dll.

Penutup

Nasionalisme dalam dimensi historisitas dan normativitas, merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia, paling tidak dalam dasa warsa seratus tahun terakhir. Tidak ada satu pun ruang geografis-sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi nasionalisme, dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Meskipun sering dianggap usang untuk dikaji dan diperdebatkan dalam komunikasi ilmiah, namun sejatinya nasionalisme tidak sekedar cukup untuk diperbincangkan dan dipertentangkan sebagaimana konsepsinya yang sering dianggap bias, melainkan perlu suatu penghayatan yang tulus untuk ditanamkan dalam kehidupan berbangsa, dan terinternalisasi serta terintegrasi dalam kultur kehidupan bernegara. Apalagi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural atau heterogen, maka diperlukan ikatan ideologis yang menjadi rasa milik bersama yang bersifat kolektif

Untuk mencegah agar masalah disintegrasi bangsa tidak terus meluas dan mencegah terjadinya nasionalisme semu, dibutuhkan kreatifitas pemerintah dalam mengelaborasi secara dinamis melalui pendekatan-pendekatan *cross-culture understanding and accommodating*, nasionalisme haruslah didasarkan pada kesediaan dan hubungan timbal-balik, saling menghargai dan sikap-sikap ramah penuh persaudaraan dan berkeadilan. Semua itu merupakan materi, esensi, substansi dan metodologi yang dibutuhkan dalam mengisi tuntutan cita-cita kebangsaan dan ilmu-ilmu pengetahuan sosial-kemanusiaan, yang perlu terus digali secara kreatif dari semboyan berbangsa dan bernegara kita: bhinneka tunggal ika.

Daftar Pustaka

- Adam, Asviwarman. 2007. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2002. *Refleksi 50 Tahun Indonesia Merdeka*. Yogyakarta: UNY.
- Amin, SM. 1967. *Indonesia di Bawah Rezim Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Dahm, B. 1969. *Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Frances Gouda. 2002. *Indonesia Merdeka karena Amerika*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Hans Kohn. 1965. *Nationalism: Its Meaning and History*. New York: D Van Nostrand Company.
- Hatta, Moh. 1974. *Detik-Detik Sekitar Proklamasi 1945*. Jakarta: Yaperna.
- Kahin, G.McT. 1963. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York : Cornell University Press
- Koentjaraningrat. 1964. *Tokoh-tokoh Antropologi*. Universitas Indonesia Press.
- _____ 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta Press.

normativitas, merupakan selam perjalanan sejarah manusia terakhir. Tidak ada satu pun sepeenuhnya dari pengaruh sejarah manusia akan berbeantuk dikaji dan diperdebatkan nalisme tidak sekedar cukup bagaimana konsepsinya yang ngghayatan yang tulus untuk nternalisasi serta terintegrasi m konteks kebangsaan Indo-ikatan ideologis yang menjadi

angsa tidak terus meluas dan hkan kreatifitas pemerintah endekatan-pendekatan *cross-*ne haruslah didasarkan pada hargai dan sikap-sikap ramah 1 merupakan materi, esensi, m mengisi tuntutan cita-cita manusiaan, yang perlu terus an bernegara kita: bhinneka

ia. Yogyakarta: Ombak Press.
onesia Merdeka. Yogyakarta:

asi Terpimpin. Jakarta: Bulan

esia Independence. Ithaca and

erika. Jakarta: Serambi Ilmu

History. New York: D Van

45. Jakarta: Yaperna.

Indonesia. Ithaca, New York :

niversitas Indonesia Press.

karta: Rineka Cipta Press.

ransformatif: Menuju Indonesia Berdaulat”

March Block. 1961. *Social Society*. Chicago: University of Chicago.

Mulyana, Slamet. 1986. *Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Musa As'yari dalam Sarbini 2005. *Islam Tepian Revolusi;Idiologi Pemikiran dan Gerakan*.Yogyakarta : Pilar Media.

Ricklef, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Rukiyati. 2008. *Pendidikan Pancasila*.Yogyakarta : UNY Press.

Soekarno. 1960. *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia*, Jakarta PP dan K.

Tunggul Alam, Wawan. 2003. *Demi Bangsaaku Pertentangan Sukarno Vs. Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wineburg. 2006. *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan, Mengajarkan Masa Lalu*, terj. Masri Maris, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zulkarnain. 2009. *Jurnal Istoria* Vol.7.No.1.09.(2009),Yogyakarta: Pendidikan Sejarah.

Ihza Mahendra, dalam [http//setneg.go.id](http://setneg.go.id), diakses tanggal 24 Oktober 2011.